

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan/ *Human Development Index In The Education Sector* mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan dibangun melalui pengukuran dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years Of Schooling*) dan Rata-rata Lamanya Bersekolah (*Mean Years Schooling*). Angka Harapan Lama Sekolah diartikan sebagai harapan yang dapat di tempuh oleh anak. Sedangkan untuk penghitungan Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan cara penyelesaian penduduk usia 25 tahun keatas dan mengelompokkan jenjang pendidikan yang sedang di tempuh atau telah ditempuh. Dalam menghitung angka nilai pendidikan, terdapat batasan yang telah di sepakati oleh beberapa negara. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 tahun dengan batas minimum 0 tahun. Sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun untuk batas maksimum dan 0 tahun untuk batas minimum.

Tabel 5.1
Persentase Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2014-2017

No	Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota			
		2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	6.38	6.44	6.45	6.51
2	Sumba Timur	6.14	6.31	6.48	6.73
3	Kupang	6.84	6.88	6.93	7.1
4	Timor Tengah Selatan	5.98	6.26	6.27	6.39
5	Timor Tengah Utara	6.69	6.87	7.13	7.14
6	Belu	7.03	7.05	7.06	7.07
7	Alor	7.74	7.75	7.76	7.77
8	Lembata	7.44	7.51	7.52	7.58
9	Flores Timur	6.86	6.98	6.99	7.12
10	Sikka	6.53	6.54	6.55	6.56
11	Ende	7.3	7.37	7.38	7.63
12	Ngada	7.51	7.6	7.61	7.85
13	Manggarai	6.79	6.81	6.97	6.98
14	Rote Ndao	6.16	6.45	6.67	6.98
15	Manggarai Barat	6.8	6.81	6.82	7.14
16	Sumba Tengah	5.1	5.12	5.21	5.51
17	Sumba Barat Daya	6.01	6.29	6.3	6.31
18	Nagekeo	7.14	7.33	7.34	7.52
19	Manggarai Timur	6.42	6.43	6.44	6.45
20	Sabu Raijua	5.54	5.56	5.68	6.02
21	Malaka	6.07	6.08	6.31	6.32
22	Kota Kupang	11.41	11.43	11.44	11.45
23	Nusa Tenggara Timur	6.85	6.93	7.02	7.15

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2018

Berdasarkan Tabel diatas Dari tahun 2014 – 2017 selalu terjadi peningkatan Angka Persentase Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan yang di lihat dari Rata-rata Lamanya Bersekolah baik di Kota maupun di Kabupaten, dimana angka Persentase paling tinggi ada pada Kota Kupang dengan angka 11,41% pada tahun 2014 dan meningkat hingga tahun 2017 mencapai

angka 11,45%, sedangkan angka Persentase paling kecil ada pada Kabupaten Sumba Tengah dengan Angka 5,1 pada tahun 2014 dan meningkat tiap Tahun hingga tahun 2017 mencapai 5,51%

5.1.2 Gambaran Belanja Langsung Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Belanja Langsung Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah:

a) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.

b) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.

c) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung dibagi menurut jenis yang terdiri dari:

a) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

b) Belanja barang/jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah berupa belanja habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan sebagainya.

c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Tabel 5.2
Persentase Belanja Langsung Sektor Pendidikan Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Belanja Langsung			
		2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	35,87	0,12	49,39	49,54
2	Sumba Timur	23,65	23,04	20,28	35,69
3	Kupang	20,75	0,72	15,80	25,72
4	Timor Tengah Selatan	20,32	10,10	11,18	16,38
5	Timor Tengah Utara	15,09	1,21	7,71	25,84
6	Belu	20,86	12,72	14,62	30,25
7	Alor	20,34	14,69	17,93	18,65
8	Lembata	19,90	6,12	19,92	29,39
9	Flores Timur	13,57	7,20	10,17	20,22
10	Sikka	16,41	10,05	17,80	27,59
11	Ende	12,39	15,59	14,78	25,98
12	Ngada	16,36	10,85	27,08	55,41
13	Manggarai	20,71	0,32	34,07	28,36
14	Rote Ndao	17,91	0,11	13,04	24,94
15	Manggarai Barat	21,20	17,40	20,36	34,06
16	Sumba Tengah	44,68	6,17	45,22	33,25
17	Sumba Barat Daya	32,51	0,13	23,66	43,26
18	Nagekeo	16,36	10,85	27,08	55,41
19	Manggarai Timur	23,32	20,41	22,38	31,82
20	Sabu Raijua	36,52	1,53	16,71	33,25
21	Malaka	22,87	24,21	15,82	22,49
22	Kota Kupang	10,90	0,11	19,79	31,47

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat di lihat, persentase anggaran belanja langsung sektor pendidikan untuk semua kabupaten kota yang ada dari tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatan dan penurunan persentase anggarannya, Dan persentase belanja lansung terbesar terjadi di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2016 dengan pertumbuhan persentase belanja langsungnya sebesar 49,39 %.

5.1.3 Gambaran Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

Belanja Tidak Langsung Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlakukan secara periodik. Karakteristik belanja tidak langsung adalah dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan) oleh masing-masing SKPD serta jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

Tabel 5.3
Persentase Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	Belanja Tidak Langsung			
		2014	2015	2016	2017
1	Sumba Barat	64,13	99,88	50,61	50,46
2	Sumba Timur	76,35	76,96	79,72	64,31
3	Kupang	79,25	99,28	84,20	66,67
4	Timor Tengah Selatan	79,67	89,90	88,82	83,62
5	Timor Tengah Utara	84,91	98,79	99,29	74,16
6	Belu	79,14	87,28	85,38	69,75
7	Alor	79,66	85,31	82,07	81,35
8	Lembata	80,10	93,88	107,81	70,61
9	Flores Timur	86,43	92,80	89,83	79,78
10	Sikka	83,59	89,95	82,20	72,41
11	Ende	87,61	84,41	85,22	74,02
12	Ngada	83,64	89,15	72,92	44,59
13	Manggarai	79,29	99,68	65,93	71,64
14	Rote Ndao	82,02	99,89	86,96	75,06
15	Manggarai Barat	78,80	82,60	79,64	65,94
16	Sumba Tengah	55,32	93,83	54,78	66,75
17	Sumba Barat Daya	67,49	0,10	76,34	56,74
18	Nagekeo	83,09	82,76	80,51	72,91
19	Manggarai Timur	76,68	79,59	77,62	68,18
20	Sabu Raijua	63,48	98,47	83,29	66,75
21	Malaka	77,13	75,79	84,18	77,51
22	Kota Kupang	89,10	99,89	80,21	68,53

Sumber : BAPPELITBANGDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat di lihat, persentase anggaran belanja tidak langsung sektor pendidikan untuk semua kabupaten kota yang ada dari tahun 2014-2017 selalu mengalami peningkatan dan penurunan persentase anggarannya, Dan persentase belanja tidak langsung terendah terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2015 dengan pertumbuhan persentase belanja tidak langsungnya hanya sebesar 0,10 %.

5.1.4 Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh yaitu data *time series* dan *Cross Section* dari tahun 2014-2017. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan dan variabel independen : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

5.1.4.1 Metode Estimasi Data Panel

Untuk mengestimasi model menggunakan analisis data panel maka menggunakan tiga pendekatan antara lain:

1. Common Effect Model(CEM)
2. Fixed Effect Model(FEM)
3. Random Effect Model(REM)

Untuk lebih jelas dapat dilihat Pada lampiran 5.

5.1.4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Tabel 5.4
Uji chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	157,180607	(20,64)	0.0000
Cross-section Chi-square	348,676994	21	0.0000

Sumber : hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Uji Chow adalah sebuah pengujian untuk menentukan apakah Common Effect Model(CEM) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah Fixed Effect Model(FEM). Dengan Hipotesis sebagai Berikut:

H_0 = Jika Chi Square $> 0,05$, maka yang diterima adalah CEM.

H1= Jika Chi Square < 0,05, maka tolak Ho dan terima FEM.

Dari hasil Uji Chow diatas Maka dapat digunakan uji Random Effect Model karena Chi Square < 0,05 yaitu 0,0000.

2. Uji Langrange Multiplier

Tabel 5.5
Uji Lagrange multiplier

Test	LM test		
	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan	565,4704	231	0.0000
Pesaran Scalet LM	15,56097		0.0000
Pesaran CD	21,68396		0.0000

Sumber : hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Uji Langrange Multiplier adalah sebuah pengujian untuk menentukan metode mana yang paling tepat apakah Common Effect Model(CEM) ataupun Random Effect Model(REM). Dengan Hipotesis sebagai berikut:

Ho= Jika Chi Square > 0,05 maka terima Ho, yaitu CEM lebih tepat.

H1= Jika Chi Square < 0,05 maka tolak Ho, yaitu REM lebih tepat.

Dari hasil uji diatas Maka metode yang paling tepat adalah REM karena hasil Chi Square < 0,05 yaitu 0,0000.

3. Uji Hausman

Tabel 5.6
Uji hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3,569204	2	0.1679

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Uji Hausman adalah sebuah pengujian untuk menentukan apakah Random Effect Model (REM) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah Fixed Effect Model (FEM). Dengan Hipotesis sebagai Berikut :

Ho= Jika Chi Square $>0,05$ maka terima Ho yaitu REM lebih Tepat

H1= Jika Chi Square $< 0,05$ maka tolak Ho yaitu FEM lebih tepat.

Dari hasil uji di atas maka metode yang tepat digunakan adalah Random Effect Model karena hasil Chi Square = 0,1679

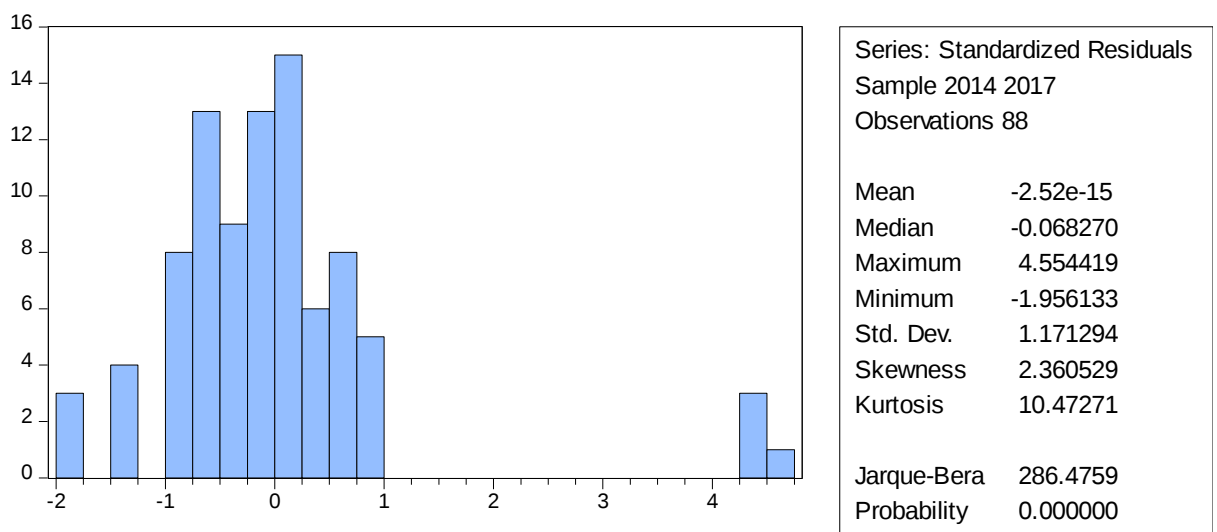
Jadi dalam pemodelan ini menggunakan Random Effect Model.

5.1.4.3 Uji Asumsi Klasik

5.1.4.3.1 Normalitas

Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung $<$ Probabilitas, maka nilai residual berdistribusi normal

Gambar 5.1
Uji Normalitas



Dari gambar di atas nilai J-B hitung 286,4759 > dari Probability 0.000000 Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

5.1.4.3.2 Multikolinearitas

Menurut Gozali (2013 :83) jika matrix korelasi tersebut tidak ada nilai > 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model.

Tabel 5.7 Uji Multikolinaritas

	X1	X2	Ket.
X1	1	-0,6690607217555388	Tidak Terjadi Multikolinieritas
X2	-0,6690607217555388	1	Tidak terjadi Multikolonieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

5.1.4.3.3 Heterokedastisitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual satu dari pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedasitas ini menggunakan metode uji Park. Jika nilai *probability* lebih kecil 0.05 maka terjadi heteroskedasitas dan sebaliknya jika nilai *probability* lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi heteroskedasitas.

**Tabel 5.8
Uji Heteroskedasitas**

<i>Variable</i>	<i>Prob.</i>	<i>Keterangan</i>
X1	0,5218	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
X2	0,8811	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Pada tabel diatas, signifikansi untuk variabel Belanja Langsung (X1) sebesar 0.5218 > 0,05, Belanja Tidak Langsung (X2) sebesar 0,8811 > 0,05 . Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model.

5.1.4.3.4 Autokorelasi

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*. Uji ini sesungguhnya dilandasi oleh model *error* yang mempunyai korelasi sebagaimana telah ditunjukkan di bawah ini.

Nilai Observasi (n) = 88

$k-1 = 3-1 = 2$

$dL = 1,575$

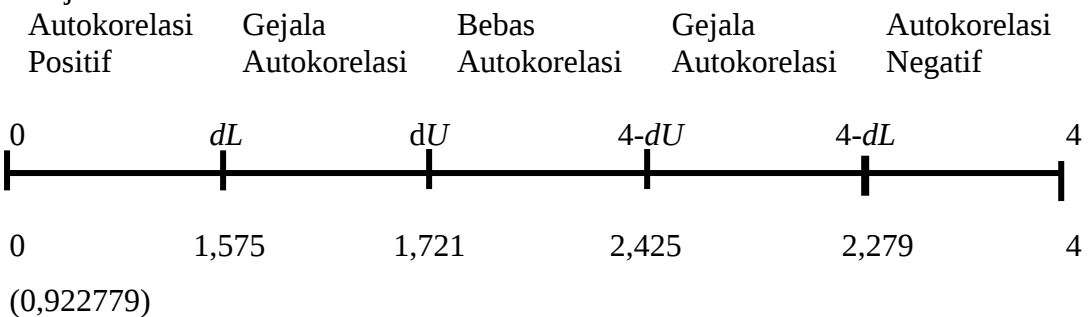
$dU = 1,721$

$dW_{hitung} = 0,922779$

Hasil uji dapat dikatakan bahwa model ini terdapat autokorelasi positif.

Tabel 5.9
Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

4. Uji Autokorelasi



5.1.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis model regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model regresi memenuhi asumsi klasik. Hasil analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh model persamaan regresi linear berganda dari variabel Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2), berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) di Provinsi NTT. Hasil

analisis menggunakan aplikasi *Eviews* diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Analisis Model Regresi Linear Berganda Menggunakan Random effect Model

Tabel 5.10
Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7,078346	0,316739	22,34757	0,0000
X1?	0,002019	0,002475	0,815620	0,4170
X2?	0,002032	0,002128	0,955106	0,3422

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

$$Y = 7,078346 + 0,002019 + 0,002032$$

1. Koefisien β_0 7,078346 berarti jika variabel Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2), dianggap konstan, maka Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) di Provinsi NTT mengalami Peningkatan sebesar 7,078346 persen.
2. Koefisien variabel Belanja Lagsung (X_1) bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel bebas yang lain. Apabila variabel Belanja Langsung (X_1) mengalami peningkatan, maka Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) cenderung mengalami peningkatan. Apabila variabel Belanja Langsung (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) mengalami Peningkatan sebesar 0,20 persen . Variabel Belanja Langsung menempati urutan Pertama mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi NTT.
3. Koefisien variabel Belanja Tidak Langsung (X_2) bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel bebas yang lain. Apabila

variabel Belanja Tidak Langsung (X_2) mengalami peningkatan, maka Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) cenderung mengalami Peningkatan apabila variabel Belanja Tidak Langsung (X_2) mengalami peningkatan sebesar satu persen, maka Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) mengalami Peningkatan sebesar 0,20 persen. Belanja Tidak Langsung (X_2) paling rendah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan Kabupaten Kota di Provinsi NTT di bandingkan dengan Belanja Langsung (X_1)

5.1.4.5 Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2) baik secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) di Provinsi NTT.

5.1.4.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan model regresi utama (lampiran 10) diperoleh nilai F-hitung sebesar 5,539179 dengan probabilitas F-hitung sebesar 0,005562. Oleh karena $\text{sig} < 0.005562 < 0.05$ maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian mayor. Dengan kata lain, variabel Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2), berpengaruh baik secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Parameter yang digunakan untuk uji F dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai F tabel dengan nilai F hitung. Dengan taraf nyata 5%

dengan $df_1(n-k) = (88-3)$, dan $df_2(k-1) = (3-1) = 2$ didapat nilai F tabel sebesar 3,11.

Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa $F_h (5,539179) > F_{t5\%} (3,11)$, sehingga inferensi yang diambil adalah menerima H_a dan menolak H_o . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “variabel Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2), berpengaruh baik secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y) di Provinsi NTT”, diterima taraf kepercayaan 95%.

5.1.4.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Tabel 5.11
Uji t

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Sign.</i>
X1	0,002019	0,815620	0,0413	Signifikan
X2	0,002032	0,955106	0,3422	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Parameter yang digunakan untuk uji t dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai t hitung dengan nilai Probabilitasnya, setelah membandingkan nilai tersebut dengan nilai t hitung dari hasil pengolahan data dengan *Eviews 9* maka dapat dinyatakan bahwa:

1. Pengaruh variabel Belanja Langsung (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y)

Nilai t-hitung untuk variabel Belanja Langsung (X_1) sebesar 0,815620 dengan dengan probabilitas sebesar 0,0413. Oleh karena probabilitas $< 0,05$ maka

inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel Belanja Langsung (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y)

2. Pengaruh variabel Belanja Tidak Langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan

Nilai t-hitung untuk variabel Belanja tidak Langsung (X_2) sebesar - 0,955106 dengan probabilitas sebesar 0,3422. Oleh karena probabilitas $> 0,05$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang Tidak signifikan dari variabel Belanja Tidak Langsung (X_2) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan (Y).

5.1.4.6 Koefisien Determinasi *Goodness of fit test* (R^2)

Tabel 5.12
Uji Koefisien determinasi

R Square	0.120314
Adjusted R Square	0.908594

Sumber : Hasil Pengolahan Menggunakan Eviews 9

Hasil regresi diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,908594 artinya bahwa 90,85 persen variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan mampu dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen Belanja Langsung (X_1), Belanja Tidak Langsung (X_2). Sedangkan 9,14 persen ($100 - 90,86$) sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai Adjusted R^2 yang besar tersebut menunjukkan Variasi dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia Sektor

Pendidikan. Nilai yang besar tersebut juga menunjukkan bahwa model dalam penelitian ini dapat digunakan.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian dilakukan berdasarkan hasil analisis uji hipotesis. Pembahasan hasil penelitian juga mengkaitkan dengan teori yang dipakai dalam penelitian dan membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan. Secara lengkap dibahas dalam sajian berikut ini.

1. Pengaruh koefisien regresi secara simultan Berdasarkan model regresi utama (lampiran 10) diperoleh nilai F-hitung sebesar 5,539179 dengan probabilitas F-hitung sebesar 0.005562. Oleh karena $\text{sig} \text{ sebesar } 0.005562 < 0.05$ maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian mayor. Dengan kata lain, variabel Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Parameter yang digunakan untuk uji F dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan antara nilai F tabel dengan nilai F hitung. Dengan taraf nyata 5% dengan $\text{df}_1(n-k) = (88-3)$, dan $\text{df}_2(k-1) = (3-1) = 2$ didapat nilai F tabel sebesar 3,11.

Berdasarkan perhitungan dengan uji F diketahui bahwa $F_h (5,539179) > F_{t5\%} (3,11)$, sehingga inferensi yang diambil adalah menerima H_a dan menolak H_o . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi “variabel Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, berpengaruh secara simultan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Provinsi NTT”, diterima taraf kepercayaan 95 %.

Jika dikaitkan dengan teori Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diupayakan melalui peningkatan pendidikan melalui anggaran yang alokasikan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan pilar untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang. Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas masyarakat, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Mulyadi, 2003).

5.2.1 Pengaruh variabel Belanja Langsung Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rajkumar dan Swaroop (2008) menyatakan penelitian-penelitian diberbagai negara maju dan berkembang telah menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah yang efisien dan memadai untuk pendidikan dapat meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi beban kemiskinan. Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah akan memberikan dampak yang sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang

tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia khususnya pada Sektor Pendidikan, yang di lihat dari Rata-rata Lama Bersekolah.

Nilai t-hitung untuk variabel Belanja Langsung sebesar 0,815620 dengan probabilitas sebesar 0.0413. Oleh karena probabilitas $< 0,05$ maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang signifikan dari variabel Belanja Langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan.

Investasi publik di bidang pendidikan, akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang baik menjadi semakin bertambah. Meningkatnya pendidikan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan. APBD dalam bentuk Belanja Langsung merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja pemerintah termasuk belanja langsung bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik bidang pendidikan yang ada. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk menyejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja pemerintah dalam bentuk belanja langsung ini, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika dibandingkan dengan teori Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Seperti pelayanan dasar dalam bidang pendidikan.

Jika dibandingkan dengan Penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Aviyanti dan Susilo (2016) mendukung penelitian yang sedang berlangsung dengan menyimpulkan hasil Penelitian bahwa belanja pemerintah bidang pendidikan selama periode 2007-2012 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

5.2.2 Pengaruh Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur berdasarkan rata-rata lamanya sekolah (BPS, 2015). Pendidikan merupakan modal manusia untuk mendapat penghidupan yang layak dan memiliki SDM yang bisa

mengikuti perkembangan dunia. Dengan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan suatu daerah sehingga dalam hal ini pemerintah mengalokasikan belanja daerah dalam bentuk belanja tidak langsung menurut fungsi pendidikan. Alokasi belanja daerah dalam bentuk belanja tidak langsung menurut fungsi pendidikan tersebut direalisasikan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Misalnya digunakan untuk membiayai penelitian siswa maupun pendidik, belanja untuk pengadaan buku penunjang kegiatan belajar mengajar siswa dan belanja untuk operasional siswa maupun pendidik untuk mengikuti pelatihan. Adapun yang paling penting adalah bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan tersebut bisa benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan yang mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan. Hal ini terkait dengan pemikiran bahwa realisasi belanja fungsi pendidikan dapat dirasakan dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada tahun yang sama.

Nilai t-hitung untuk variabel Belanja Tidak Langsung sebesar 0,0955106 dengan probabilitas sebesar 0,3422. Oleh karena nilai probabilitas lebih Besar dari 0,05 maka inferensi yang diambil ialah secara parsial ada pengaruh yang Tidak signifikan dari variabel Belanja Tidak Langsung terhadap variabel Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan.

Jika dibandingkan dengan teori berbanding lurus dengan teori yang dikemukakan oleh Rajkumar dan Swaroop (2008), realisasi belanja daerah akan

memberikan dampak yang sangat berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari meningkatnya IPM.

Jika Dibandingkan dengan Penelitian terdahulu Septiana M.M Sanggelorang, Vekie A. Rumate, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015) dengan judul pengaruh Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Sulawesi Utara. Mendukung penelitian yang sedang berjalan dengan hasil 1) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistic signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan; 2) Pengeluaran pemerintah di bidang Kesehatan berpengaruh negatif yaitu meningkat sebesar -0,438 dan secara statistic tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan.